



## JANGAN ADA PENGKOTAKAN GELAR

# Guru Berharap Tunjangan Segera Cair

YOGYA (KR) - Ketua Perkumpulan Guru Karyawan Sekolah Swasta Indonesia (PGKSSI) Propinsi DIY, Maruli Taufiq SE, berharap tidak ada lagi pengembalian sisa dana insentif guru dan karyawan swasta seperti tahun lalu. Meski setuju dengan prioritas diberikan kepada guru yang statusnya sudah sarjana, Maruli berharap pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif berdasarkan senioritas masa kerja. Hal ini akan meningkatkan semangat guru dalam melaksanakan tugasnya.

"Saya khawatir kalau prioritas pemberian insentif hanya berdasarkan gelar sarjana, akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di DIY, karena guru yang tidak mendapat justru menjadi *nglokro*. Lebih baik jika insentif diberikan sesuai dengan pengabdian riil," kata Maruli. Misalnya saja guru yang hanya sarjana muda telah mengabdikan lima tahun lebih diprioritaskan daripada guru bergelar sarjana yang mengabdikan baru 2 tahun.

Menurut Maruli Taufiq, pada dasarnya ia lebih sepekat jika dalam pemberian insentif tidak dikotakkan antara yang sarjana atau tidak. Maruli juga berharap tahun ini tidak ada lagi dana insentif yang dikembalikan seperti tahun lalu yang mencapai Rp 5 miliar. Apalagi dana insentif tahun ini sebanyak Rp 31 miliar, lebih besar dibanding tahun lalu yang jumlahnya Rp 27 miliar.

"Kami sebenarnya setuju saja dengan adanya persyaratan penerima dana insentif, namun dana yang ada

harus digunakan untuk kesejahteraan guru dan karyawan sekolah swasta. Jangan sampai ada sisa dana yang dikembalikan kepada pemerintah seperti tahun lalu," kata Maruli.

Menanggapi adanya kebijakan baru dalam pemberian insentif bagi guru swasta seperti pendidikan minimal sarjana dan usia maksimal 60 tahun (bagi guru), Kepala SMP Gotong Royong Amelita BR Tarigan mengatakan, supaya tidak ada pihak yang dirugikan alangkah baiknya jika kebijakan baru itu dikaji ulang. Pasalnya jika kebijakan itu benar-benar dilakukan secara *zaklek* (tanpa toleransi) selain bisa mempengaruhi kinerja dikhawatirkan akan menimbulkan krisis kepercayaan.

"Pada prinsipnya untuk sekolah kami tidak terlalu masalah karena sebagian besar guru sudah berijazah S1. Tapi bagi guru yang masa kerjanya sudah lama dan belum berijazah S1 tentu cukup memberatkan. Supaya mereka tidak dirugikan selain sosial-

isasi, alangkah baiknya guru yang belum berijazah S1 diberi dispensasi," paparnya, seraya menambahkan dalam kondisi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang tunjangan insentif akan sangat berarti bagi guru swasta.

Amelita menambahkan, berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh, tunjangan insentif untuk guru SMP di Kota Yogyakarta rencananya bisa dicairkan Jumat (12/9). Dengan besarnya tunjangan disesuaikan dengan masa kerja masing-masing guru. "Menunggu sesuatu yang tidak pasti adalah pekerjaan yang membosankan, untuk itu saya sangat berharap agar tunjangan bisa segera cair," ungkapnya penuh harap.

Komentar serupa diungkapkan oleh Kepala SMA Taman Madya Perguruan Tamansiswa Jetis Yogyakarta Sriyana SPd. Menurutnya, kebijakan tersebut sebetulnya sudah berlaku beberapa tahun lalu. Jadi tidak terlalu mengejutkan, di samping sudah disosialisasikan jauh-jauh hari kebetulan hampir seluruh guru di SMA Tamansiswa Jetis sudah S1. "Tidak masalah bagi tempat kami," kata Sriyana.

Disebutkan, rasa kekeluargaan di Perguruan Tamansiswa cukup bagus. Jika ada rezeki semua ikut merasakan. Guru-guru yang menerima insentif, dengan rasa kekeluargaan *urunan* memberi kepada guru yang tidak menerima. Dengan begitu, semua bisa

Tembusan Kepada Yth :

ikut merasakan. Karena penerimaan insentif tiap beberapa bulan sekali, maka jumlahnya jadi terasa banyak.

Terpisah Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Drs Wahyuntana, berharap insentif GTT/PTT bisa dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Insentif tersebut sangat berarti bagi mereka dan dapat meringankan beban. Terlebih, di tengah situasi harga-harga kebutuhan pokok melambung dan konsumsi untuk Lebaran cukup tinggi.

Namun untuk melakukan hal itu semua pihak perlu melakukan introspeksi, terutama untuk penyederhanaan sistem. "Masalah anggaran khan ada sistemnya. Kami berharap ada penyederhanaan mekanisme sehingga jika sudah siap dan memenuhi syarat, insentif bisa segera diberikan," ucapnya.

Pihaknya juga sudah mengomunikasikan dengan Dinas Pendidikan. Sebab introspeksi ini tak hanya bagi pemerintah tapi juga para pelaku (GTT/PTT). Ia berharap semua pihak ikut membantu para GTT/PTT. Mereka sendiri juga harus konsisten dengan segera melengkapi persyaratan.

"Dalam hal ini tidak bisa sendiri-sendiri. Misalnya kota sudah siap tapi kabupaten lain belum, ya tetap harus menunggu. Tapi ke depan kami berharap ada penyederhanaan sistem untuk mempermudah," kata Wahyuntana. (R-1/R-5/War/R-3)-g

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005